Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi IV
Minggu ke-2 Januari
(5 s.d. 11 Januari 2026)
2026

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

STRATEGI RESILIENSI PRODUKSI BERAS NASIONAL

Firyal Nabihah
Analis Legislatif Ahli Pertama
firyal.nabihah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Upaya menuju swasembada beras nasional menunjukkan perkembangan yang semakin solid. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kemandirian beras merupakan pilar strategis ketahanan nasional, seiring dengan penguatan cadangan dan produksi domestik. Hingga awal 2026, cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 3 juta ton, mencerminkan kondisi pasokan yang relatif aman. Dari sisi produksi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada pada level 31,19 juta ton per tahun, sehingga terbentuk surplus sebesar 3,52 juta ton. Capaian ini diperkuat dengan target produksi beras tahun 2026 sebesar 33,8 juta ton. Bahkan proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian memperkirakan produksi Indonesia dapat mencapai 36 juta ton, yang menegaskan bahwa posisi Indonesia berada pada jalur menuju swasembada beras yang berkelanjutan.

Meski secara nasional berada dalam kondisi surplus, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tantangan produksi di tingkat regional akibat bencana ekologis. Pada November 2025, proporsi lahan padi yang sedang ditanami di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat 34,63 persen, lebih rendah dibandingkan pada November 2024 sebesar 36,7 persen. Penurunan ini dipicu oleh banjir yang mengganggu proses tanam dan distribusi sarana produksi. Dari total luas lahan terdampak sekitar 70.000 hektare, sekitar 11.000 hektare mengalami puso atau gagal panen, sehingga berpotensi menekan produksi beras regional.

Berdasarkan kerangka sampel area padi BPS, dinamika produksi menunjukkan disparitas antardaerah. Sebagai contoh, potensi luas panen padi di Aceh pada 2025 diperkirakan mencapai 279.913 hektare, turun 7,07 persen dibandingkan 2024. Sebaliknya, Sumatera Utara justru mencatat peningkatan luas panen sebesar 28,03 persen, dari 419.463 hektare menjadi 537.044 hektare, sementara Sumatera Barat diproyeksikan turun 3,88 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan produksi bersifat spasial dan belum menggerus capaian produksi beras nasional secara signifikan, namun tetap memerlukan intervensi kebijakan berbasis wilayah.

Ke depan, risiko terhadap produksi beras diperkirakan meningkat akibat potensi El Nino pada periode Juli 2026 hingga Juli 2027, yang dapat menurunkan ketersediaan air irigasi dan meningkatkan risiko kekeringan. Selain faktor iklim, pola tanam padi tanpa jeda dalam beberapa tahun terakhir juga berpotensi meningkatkan serangan hama dan penyakit. Kombinasi tekanan tersebut diperkirakan dapat menurunkan produksi beras nasional sekitar 5 persen atau setara 1,7 juta ton, apabila tidak diantisipasi melalui langkah adaptif yang terukur.

Dalam merespons tantangan tersebut, strategi penguatan swasembada beras perlu dijalankan secara terintegrasi. *Pertama*, percepatan pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, khususnya di wilayah yang telah memiliki waduk dan bendungan baru. *Kedua*, penerapan sistem pengelolaan air sawah melalui metode *alternate wetting and drying* yang terbukti mampu menghemat penggunaan air irigasi sekitar 20—30 persen tanpa

menurunkan produktivitas padi. *Ketiga*, perluasan program pompanisasi di lahan sawah yang dekat dengan sumber air serta pembangunan sumur dalam di wilayah tadah hujan untuk menjaga kesinambungan tanam. *Keempat*, penerapan kembali pola tanam padi berjeda penting dilakukan untuk menekan siklus hama dan penyakit sekaligus menjaga kesuburan tanah. *Kelima*, pemulihan lahan pertanian pascabencana perlu dilakukan secara bertahap melalui pendataan rinci kondisi sawah, perbaikan infrastruktur pendukung, dan distribusi sarana produksi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Seluruh strategi tersebut diarahkan agar swasembada beras tidak hanya menjadi target produksi semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional jangka panjang.

Atensi DPR

Capaian surplus produksi beras nasional di satu sisi menunjukkan kemajuan signifikan menuju swasembada beras, namun di sisi lain masih dihadapkan pada tantangan risiko iklim, bencana ekologis, dan disparitas produksi antardaerah, sehingga perlu menjadi perhatian khususnya bagi Komisi IV DPR RI. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat mendorong penguatan substansi pengamanan produksi dan pencapaian swasembada beras dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2025. Dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan efektivitas pelaksanaan program pengamanan produksi beras melalui penguatan koordinasi dengan Kementan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Bapanas, dan *stakeholder* terkait lainnya, terutama terkait aspek rehabilitasi jaringan irigasi, pelaksanaan pompanisasi, serta pengelolaan cadangan dan distribusi beras. Sementara itu, dalam fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI berperan mengawal kecukupan dan keberlanjutan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara bagi Kementan dan mitra kerja terkait, guna mendukung upaya intensifikasi dan modernisasi pertanian serta pemulihan lahan terdampak bencana.

Sumber

antaranews.com, 8 Januari 2026;
cnbcindonesia.com, 9 Januari 2026;
kompas.id, 6 dan 8 Januari 2026;
msn.com, 7 Januari 2026; dan
news.detik.com, 6 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER
Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita S., Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making